

ARSITEKTUR UNTUK RAKYAT?

SUATU KAJIAN TENTANG PENDEKATAN PERANCANGAN PARTISIPATIF

Oleh:

Anak Agung Gde Djaja Bharuna

Dosen Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Udayana
E-mail: djajabaruna@yahoo.com

ABSTRAK

Tema umum dalam makalah ini adalah arsitektur untuk rakyat berpenghasilan rendah di daerah urban/perkotaan, di Indonesia. Pada dasarnya pempunian dari tulisan ini adalah solusi yang dilakukan dan diarahkan pada pembahasan mengenai pendekatan perancangan partisipatif. Namun proporsi pembahasan dalam tulisan ini lebih banyak diarahkan pada masalah perumahan karena merupakan wujud arsitektur yang paling dekat dengan masyarakat.

Ada dua isu besar yang terkandung dalam substansi tulisan ini, yaitu pertama isu budaya yang menelaah perancangan partisipatif akan potensinya dalam ruang lingkup arsitektur sebagai produk budaya, dan kedua isu politik yang menelaah pendekatan ini dari lingkup pembangunan yang menyangkut masalah ideologi dalam memandang solusi/pemecahan permasalahan ini. Akan tetapi kedua isu ini tidak dipisahkan benar-benar melainkan dibiarkan berbaur dan mewarnai tulisan dalam sapuan tebal dan tipis. Akan tetapi isu politik terutama akan dibahas pada bagian kesimpulan, sedangkan isu budaya ditempatkan pada telaah teoritis yang mengangkat potensi lokal/ regionalisme arsitektur tradisional.

Kata Kunci: rumah, kampung-kota, perancangan partisipatif.

ABSTRACT

The general topic in this paper is architecture for people on low pyment who live in rural urban area (city), in Indonesia. The main frame in this paper is the solution that directed to discussion about Participatory Design Approach (PDA). The proportion of discussion on this paper direction for most home problem, because in fact is nearest architect figure by the people.

This paper has two big substansial issues. The first issue is culture issue that studying participation design and the potency in architecture area as a culture product, and the second issue is a political issues that studying by approach national building area that containing ideology problem as solution this problem. Both of those issue never truly partial, they let it mixed and colored this paper dynamically. The final dicuss of political issue placed on conclusion, and cultural issue will be theoretical discuss that bring up the regional potency (regionalism) of traditional architect.

Key Words: house, kampung – kota, participatory design approach.

ARSITEKTUR UNTUK RAKYAT DALAM LINGKUP PERUMAHAN

Arsitektur dalam wujud rumah tempat tinggal melekat erat dalam jiwa dan tradisi

masyarakat manapun. Rumah merupakan suatu hal yang kompleks meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, ekologi, yang memiliki hakekat dan fungsi yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Pembahasan berikut

menyoroti aspek yang mendasari pengertian rumah, perumahan, dan perumahan dalam perspektif kenyataan sosial yang lekat dengan masalah perkotaan, yakni kampung-kota, yang identik dengan kemiskinan.

1. Rumah

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya; membutuhkan suatu tempat yang pada saat tertentu dapat hidup tanpa diganggu oleh orang lain. Kebutuhan akan rumah merupakan salah satu motivasi untuk mengembangkan kehidupan yang lebih tinggi, di samping kebutuhan jasmani lainnya, yaitu sandang, pangan dan kesehatan.

Rumah merupakan suatu ruang yang betul-betul menjadi milik seseorang yang bisa diatur menurut selera dan kehendak yang memilikinya.

Pada jaman dahulu, manusia purba menggunakan gua-gua sebagai rumah, supaya terlindungi dari binatang-binatang buas serta gangguan-gangguan alam lainnya, seperti misalnya hujan, angin, panas, dan sebagainya. Dengan berkembangnya jaman, melalui berbagai tahapan, bentuk rumah semakin berkembang juga, sehingga akhirnya mencapai tahap seperti sekarang, mempunyai dinding serta atap yang kuat, sejalan dengan perkembangan fungsi dan teknologi, yang merupakan cerminan dari budaya dan lingkungannya.

Sejalan dengan kebutuhan manusia penghuninya, maka sebuah rumah harus memenuhi tiga fungsi utamanya, yaitu:

- a. Rumah sebagai tempat tinggal, tempat di mana seseorang bermukim (menetap), dan mendapatkan ketenangan fisik dan mental.
- b. Rumah merupakan mediasi antara manusia dengan dunia. Dengan mediasi ini terjadi suatu dialektik antara manusia dengan dunianya. Dari keramaian dunia manusia menarik diri ke dalam rumahnya dan tinggal dalam suasana ketenangannya, untuk kemudian keluar lagi menuju dunia luar untuk bekerja dan berkarya. Demikian seterusnya terjadi berulang-ulang.

- c. Rumah merupakan *arsenal*, di mana manusia mendapatkan kekuatannya kembali, setelah melakukan pekerjaan yang melelahkan.

Maka dari itu sebuah rumah amat penting bagi seseorang dalam kehidupan yang wajar. Disamping harus dapat memenuhi berbagai fungsi tersebut di atas, rumah juga menjadi tempat berlindung dan sebagai tempat berlangsungnya proses sosialisasi, yaitu proses di mana seseorang diperkenalkan kepada nilai, adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Dalam eksistensi manusia rumah memiliki tiga kenyataan dasar yaitu: keterbukaan, kesatuan struktural dalam dunia dan kesatuan struktural dalam sesama (masyarakat). Ketiga kenyataan ini harus nampak dan terwujud dalam rumah untuk lebih mengungkapkan arti dan makna rumah dalam kehidupan manusia. Rumah di sini bukan sekedar benda yang selanjutnya cenderung untuk dilihat sebagai sarana hidup, tetapi lebih merupakan proses bermukim, yaitu kehadiran aktif manusia. Kehadiran ini adalah menciptakan ruang hidup dalam lingkungan sekitarnya dengan menstrukturisasikannya menjadi dunia yang manusiawi.

Dengan eksploitasi kesatuan struktural itu terungkap juga bahwa rumah merupakan pusat realisasi kehidupan manusia. Manusia bukan sebagai makhluk hidup yang sudah lengkap dan sempurna, tetapi sebagai potensi dengan berbagai bakat dan kemampuannya. Potensi itu pada dasarnya diaktualisasikan dalam lingkungan rumah: dalam rumah manusia dididik, dibentuk dan berkembang menjadi seorang pribadi. Rumah di sini dalam arti luas ialah dunia, di mana manusia harus mengembangkan diri dengan merealisasikan kemampuan serta memenuhi kebutuhannya.

Dari konteks pemikiran itu dapat dikatakan bahwa rumah tidak dapat dipisahkan dari dunia. Manusia-rumah-dunia merupakan tahapan yang harus dilalui menuju kepada pemenuhan eksistensi manusia. Orientasi obyektif akan melihat manusia terlepas dari rumah dan dunianya, dan oleh karena itu melihat rumah dan dunia sebagai kenyataan

terpisah dan tidak lain sebagai alat, obyek dan sasaran hidup, dan akhirnya rumah hanyalah unsur ekstrinsik yang mempunyai arti karena manfaatnya dalam kehidupan manusia. Hal ini merupakan suatu kelemahan yang mendasar. Maka sebaiknya rumah dilihat sebagai baigan struktual eksistensi manusia, yang harus mampu menampung dinamika manusia.

Rumah dalam pengertian dan makna yang sepenuhnya bersifat multidimensional. Rumah harus mampu membuka jalan dan memberikan saluran terhadap kecenderungan, kebutuhan, aspirasi dan keinginan manusia dengan sepenuhnya.

Rumah juga dapat dilihat sebagai pusat kegiatan budaya. Dengan pengertian di atas bahwa rumah merupakan proses bermukim, yaitu kehadiran aktif manusia, maka gerak-gerik dan tingkah laku manusia merupakan proses dan dinamika budaya. Jadi rumah juga merupakan institusi budaya, karena tidak hanya sebagai hasil kegiatan manusia saja tetapi juga karena peranannya sebagai tempat dalam menampung, menyalurkan dan mengembangkan usaha serta langkah menuju kepada perbaikan taraf hidup manusia sebagai manusia.

2. Perumahan

Secara fisik, perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal, di mana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya; serta dilengkapi dengan prasarana-prasarana sosial ekonomi, budaya, dan pelayanan (*service*), yang merupakan sub-sistem dari sistem kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya.

Pengertian perumahan sering dikaitkan dengan pembangunan sejumlah rumah oleh berbagai instansi, baik instansi Pemerintah maupun Swasta, dengan disain unit-unit rumah yang sama atau hampir sama.

Jumlah rumah dalam kelompok perumahan ini tidak tertentu, dapat terdiri dari dua atau tiga rumah, atau dapat juga sampai

ratusan atau ribuan unit rumah. Bentuknya pun tidak terbatas hanya pada bangunan yang satu lantai saja, yang berderet-deret secara horisontal, melainkan dapat pula merupakan bangunan-bangunan bertingkat, yaitu yang merupakan *maisonette* atau merupakan rumah susun.

Perumahan satu lantai yang dibangun secara horisontal membutuhkan lahan yang luas, sehingga pada dewasa ini, di mana lahan semakin lama menjadi semakin langka dan semakin mahal, terutama di dalam kota, Pemerintah mulai berpaling pada bentuk rumah yang lebih praktis dan tidak membutuhkan lahan terlalu banyak, yaitu rumah susun.

Rumah susun ini, di negara-negara lain, terutama negara yang telah maju sudah tidak asing lagi; namun di Indonesia belum begitu banyak dibangun, sehingga belum begitu dikenal oleh masyarakat luas, masih sangat terbatas pada masyarakat tertentu saja. Namun dengan dibangunnya Rumah Susun oleh Perumnas, masyarakat mulai mengenalnya, terutama kalangan masyarakat berpenghasilan sedang dan rendah, yang menjadi sasaran Pemerintah.

Sedangkan di sisi lain kehidupan masyarakat kota terjadi juga *trend* baru perumahan yang menyentuh sebagian masyarakat yaitu pembangunan apartemen. Secara kualitas maupun kuantitas pembangunan perumahan mewah seperti *real estate*, apartemen, dan kondominium berkembang pesat untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi kalangan mampu.

3. Perumahan Rakyat Kecil di Indonesia: *Kampung Kota*

Sebagian besar wilayah kota-kota besar di Indonesia ditempati oleh pemukiman tidak terencana, tempat tinggal kebanyakan kaum migran ke kota yang dinamakan *kampung*. Satu kampung biasanya terbentuk dengan pertumbuhan penghuni sedikit-demi sedikit dan tidak melalui kedatangan banyak orang sekaligus. Karena kampung-kampung ini tidak direncanakan dan sering berpenduduk padat (sampai 900 orang tiap ha), betapapun

tanahnya dibagi-bagi lagi, prasarana tetap tidak memadai; jalan dan gang sempit sekali, becek, tidak diaspal, sarana jamban sama dengan di daerah pedesaan, air bersih tidak ada, sekolah, pusat kesehatan dan pelayanan untuk masyarakat serta lapangan untuk bermain atau rekreasi tidak ada, serta penampilannya kurang 'cantik' memberikan efek visual yang tidak baik.

Memang salah satu ciri khas *kampung-kota* ini adalah kemiskinan dan buruknya kualitas hidup. Kampung kota bisa juga diartikan sebagai suatu *permukiman yang tumbuh di kawasan urban tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi kota*.

Pada akhir tahun 70-an kira-kira sepertiga dari penduduk kota besar di kawasan Asia, termasuk Indonesia tergolong dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang hidup di lingkungan pemukiman 'marginal'. Kelompok ini tumbuh kurang lebih dua kali lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk kota, dan empat kali tingkat pertumbuhan penduduk secara keseluruhan.

Karakteristik lain dari tradisi pemukiman kota di Indonesia ini terletak pada kehidupan ekonomi kota yang disebut informal. Masyarakat dengan sistem ekonomi ini, yang disebut-sebut sebagai sektor informal lahir dari pasar tradisional yang berakar dari kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Mekanisme ekonomi terjadi dengan cara melakukan transaksi barang/jasa di "kaki lima" atau "asongan" (menjajakan dari rumah ke rumah).

Namun di sisi lain kampung-kota mewakili suatu budaya bermukim yang memberi warna dan aktifitas khas perkotaan di Indonesia. Bagaimanapun komunitas ini secara potensial memiliki konsep sendiri tentang rumah di tengah kehidupan modern, konsep lahir dari perjuangan 'mempertahankan hidup' (*survival*) masyarakat tradisional agraris di tengah kultur modern perkotaan. Hal ini dalam modus arsitektural bisa dipandang menjadi suatu potensi sebagai produk arsitektur yang khas Indonesia, suatu 'dunia hidup' ala Indonesia. Maka dari itu diperlukan suatu

program pembangunan fisik yang menjaga tetap tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi dan kultural komunitas tersebut.

Kebijaksanaan pemerataan pembangunan yang dijalankan pemerintah sekarang ini, menyangkut juga rencana perbaikan perumahan rakyat miskin di kampung-kampung. Banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menempuh perbaikan keadaan perumahan ini, di antaranya yaitu:

- a. Menggusur kampung dan membangun rumah susun (Program peremajaan kota)
- b. Membangun perumahan baru di pinggir kota (Pembangunan kompleks perumahan)
- c. Memperbaiki kampung (Program KIP)

Ketiga hal di atas memiliki permasalahan masing-masing dalam pelaksanaannya. Rumah susun masih asing di Indonesia sehingga sering kali orang bimbang untuk tinggal di rumah susun, penggusuran kampung akan mengurangi jumlah rumah sedangkan dengan padatnya penduduk tidak mungkin sanggup membangun rumah-rumah baru. Perumahan di pinggir kota menemui masalah ongkos transportasi yang memberatkan masyarakat miskin. Hal yang paling efektif sebenarnya adalah perbaikan kampung, tetapi yang menjadi masalah bagaimana rancang bangunan yang paling tepat untuk mewadahi kelompok masyarakat dengan ekonomi informal ini dalam perancangan formal, lalu bagaimana pendekatan pada masyarakat itu, dan masalah lain yang menyertainya adalah siapa yang membangun dan siapa yang membiayai pembangunannya?

Selama ini dianggap sebagai pemeran utama pembangunan perumahan adalah 'tiga-besar': pemerintah, swasta dan masyarakat, serta satu kelompok lagi yang diistilahkan dengan Hibrida, atau *Housing Association*, bisa berupa koperasi, yayasan, atau LSM.

Dalam hal ini agaknya perlu adanya pembedaan pengertian antara istilah 'perumahan' (*housing*) dengan "dirumahan" (*being housed*), mengacu pada dilibatkan atau tidaknya masyarakat penghuni dalam proses perencanaan pembangunan perumahan. Hal ini penting dipertimbangkan untuk mencari

alternatif baru dalam program dan kebijaksanaan tentang perumahan. Peran serta masyarakat secara aktif akan menumbuhkan rasa memiliki sehingga motivasi untuk memelihara dan memperbaiki lingkungan akan meningkat. Pendekatan ini disebut sebagai pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau CBD (*Community Based Development*).

Perencanaan dan perancangan di sini bukan merupakan suatu sistem yang selesai setelah realisasi fisiknya rampung, bukan juga sebagai obyek suatu karya seni, melainkan juga sebagai suatu proses belajar tinggal di dalam suatu dunia hidup sebagai wata komunitas dan menjadi proses yang berkesinambungan mengikuti dinamika yang terjadi di dalamnya. Dalam hal ini arsitek, sebagai konsultan pembangunan, diharapkan siap belajar memahami proses-proses sosiokultur yang ada yang akan terjadi dalam menciptakan perencanaan dan perancangan yang terbuka untuk interpretasi baru tentang apa dan bagaimana dunia hidup. Keterbukaan ini akan memberi peluang pada penghuni untuk mampu memperkaya dunianya sesuai dengan aspirasi dan persepsi mereka.

ORIENTASI DALAM PEMECAHAN MASALAH PERUMAHAN

1. Orientasi pada Produk

Salah satu permasalahan yang timbul dari upaya pemecahan masalah perumahan untuk rakyat ini karena adanya orientasi pada produk, yang didasari suatu anggapan bahwa terjadi kekurangan, ketiadaan, atau kemerosotan jumlah rumah (kuantitas), dan juga didasari anggapan bahwa sejumlah rumah harus disediakan bagi sejumlah keluarga tertentu.

Anggapan tersebut menjadi alasan bagi adanya asumsi baru bahwa setiap keluarga riarus memiliki satu rumah (dengan standar minimum atau tipe standar). Sasaran dari pendekatan produk ini adalah suatu program untuk membuat perumahan rakyat dengan skala besar, yang ditujukan pada semua lapisan masyarakat, didasari suatu institusi perumahan yang kaku.

Namun pada kebanyakan negara, perumahan massal yang berhasil dibangun hanya mampu mencapai target 10% dari total penduduk saja, Lagipula golongan pegawai negeri menjadi satu-satunya golongan yang diprioritaskan (pembangunan skala kecil dan sasaran yang terbatas).

Jadi kelemahan orientasi pada produk ini adalah:

- a. Jumlah rumah yang ada (*house stock*) bukan angka riil, sebab setiap orang pastilah tinggal dalam suatu rumah. Masalahnya terletak pada tingginya standar yang dipasang bagi yang dapat dianggap 'rumah layak'.
- b. Fakta lain adalah *trend* produksi rumah tidak pernah bisa mengejar pertambahan jumlah keluarga. Jadi akan selalu ada jurang yang seinakin melebar (*housing defisit*).

2. Orientasi pada Proses

Orientasi pada proses merupakan orientasi yang diarahkan pada cara menghadapi permasalahan perumahan yang dasari beberapa isu, seperti:

- a. Isu terencana dan tak terencana; kenyataan menunjukkan bahwa senantiasa ada rencana dengan beberapa tingkatannya, pada perkembangan perumahan
- b. Isu partisipasi rakyat dan kemudahan sumber daya. Kenyataan bahwa biaya dapat ditekan dengan memanfaatkan bahan bangunan yang tersedia (apa saja), dan memanfaatkan tenaga kerja murah.

Pendekatan ini menerapkan strategi-strategi yang lebih realistis (seperti mengubah standar perumahan), program yang lebih realistis (program perbaikan), proyek yang lebih realistis (seperti *site and servis*), untuk mencapai perubahan-perubahan yang lebih mendasar.

Telah terbukti pada banyak kasus bahwa dengan pendekatan proses ini proyek pemukiman berskala besar mungkin dibangun untuk banyak kelompok/golongan masyarakat,

terutama rakyat kecil yang berpenghasilan rendah.

Tetapi keberhasilan pendekatan ini harus ditunjang dengan adanya jaminan bahwa di penghuni harus mampu membayar biaya pengembangan dan pemeliharaan. Jadi mereka harus punya pendapatan yang stabil, yang pada banyak kasus ternyata cukup jarang dapat terjadi. Kemauan untuk membayar ternyata tergantung pada faktor-faktor lain, seperti keamanan perumahan, lokasi dan kualitas rumah.

3. Investasi Pemerintah pada Bidang Perumahan

Seringkali kekurangan/ketiadaan sumber daya dituding sebagai biang keladi masalah pemukiman. Namun faktornya ruang, waktu, dan energi selalu tersedia. Masalahnya adalah biasanya sumber daya itu terhambat oleh institusi. Sumber daya yang tak terjangkau karena dihalangi oleh hukum atau harganya terlalu tinggi bukanlah kekurangan yang sebenarnya.

Persoalan lain timbul dari perbedaan sudut pandangan. Perencana dan perancang cenderung melihat bangunan terlebih dahulu, sementara sosiolog cenderung melihat manusia yang tanpa melihat rumahnya. Untuk memperoleh pengertian yang utuh dan benar tentang permukiman, maka sangatlah perlu untuk melihat seluruh sistem hubungan manusia dan permukiman yang sifatnya dinamis. Intervensi pemerintah pada sistem permukiman biasanya pada tiga tingkatan:

- a. Skala kecil, proyek perumahan, paket
- b. Skala medium, infrastruktur, komponen
- c. Skala besar, kemudahan memperoleh sumber daya dasar, elemen infrastruktur lainnya

Biasanya pemerintah menanamkan sebagian besar modalnya pada proyek-proyek pemukiman dan infrastruktur, sementara sisanya yang sedikit ditanamkan di sumber daya dasar. Pola investasi pemerintah ini umumnya bersifat konstan, sehingga intervensi tersebut tidak akan dapat mengatasi jurang yang sangat cepat melebar antara permintaan dan penyediaan rumah.

Untuk dapat mengejar ketinggalan itu, maka intervensi pemerintah sebaiknya dibalik. Pengeluaran untuk sumber daya dasar dimaksimalkan, sementara pengeluaran untuk proyek rumah berskala kecil dikurangi. Selain itu dana pemerintah yang terbatas sebaiknya dikeluarkan sesuai dengan prioritas yang berubah sepanjang waktu. Tetapi masalahnya adalah pengeluaran dana pemerintah untuk tingkat elemen biasanya sangat menguntungkan secara politis, sebaliknya pengeluaran dana pemerintah yang kecil untuk tingkat elemen tidak menyatukan secara politis.

Untuk memberikan atap bagi kaum tak beratap paling tidak menemui banyak halangan yang harus ditembus, antara lain: organisasi, pertukaran (*exchange*), tanah (hak atas ruang), rencana dan rancangan, teknik, pembangunan, dan pemeliharaan.

ANALISIS DAN SIMPULAN

Kondisi pemukiman di kalangan masyarakat bawah di Indonesia yang kebanyakan merupakan permukiman tak terencana, yang mengharuskan lebih banyak lagi peran arsitek pada perencanaan permukiman tersebut. Lebih jauh lagi perencanaan tersebut memandang rumah sebagai suatu yang hakiki dalam kehidupan manusia. Ketiga kasus di atas menunjukkan upaya arsitek untuk memasukkan arsitektur ke dalam kehidupan manusia, khususnya rakyat golongan bawah.

1. Masyarakat Marjinal

Program pengadaan perumahan bagi masyarakat bawah nampaknya belum menunjukkan keberadaan yang pasti dan belum banyak meningkatkan kelayakan hunian.

Berbagai kasus penggusuran perumahan kampung-kota masih terus berlangsung, dan ini merupakan bukti bahwa peningkatan di satu sisi kehidupan tidak menjamin adanya peningkatan juga secara merata di sisi yang lain. Hal ini merupakan juga akibat dari ketidak-siapan masyarakat kalangan bawah itu untuk berpartisipasi sebagai bentuk dari

ketidaksiapan tradisi atau pranata untuk menerima perubahan dan ketidakberpihakan para birokrat penentu keputusan dan kalangan pemilik modal (hal ini menyangkut masalah ideologi). Yang terjadi pada akhirnya adalah proses marjinalisasi yang kemudian mengkondisikan "ketergantungan" (jika dipandang dari segi kapitalistik, dan kini tanpa disadari sebenarnya masyarakat kita memiliki gejala-gejala pergeseran ke arah kapitalistik).

Proses marjinalisasi tampaknya semakin ekstrim terjadi, tidak hanya di perkotaan, bahkan di masyarakat pedesaan sendiri semakin membesar jumlahnya. Untuk sebagian pihak keberadaan masyarakat marjinal dengan budaya bermukimnya dianggap sebagai suatu masalah atau penyakit yang harus disembuhkan dan diangkat. Tetapi dari pihak lain terjadi juga paradoks baru bahwa masyarakat marjinal tidak melihat penghidupan di hunian semacam itu sebagai masalah melainkan sebagai bagian dari budaya mereka yang khas, lahir dari perjuangan di dalam kemiskinan.

Masyarakat marjinal ini pada akhirnya menciptakan budaya majinal, dalam arti memberntuk kesadaran adakan nilai-nilai dan norma-norma tersendiri. Salah satu ciri utama dari kesadaran yang marginalistik itu, ialah kecenderungan untuk mengambil jarak secara sosiokultural dari semua bentuk nilai dan aturan yang mapan. Di samping itu, kaum marjinal subsisten cenderung tidak memiliki imajinasi perencanaan sosial yang panjang, sehingga pandangan "Hari ini untuk hari ini" lebih dominan, tanpa memiliki kesadaran mobilitas untuk menggapai jenjang sosial-ekonomi lebih tinggi. Masyarakat marjinal adalah masyarakat apatis terhadap lingkungan hunian dan sekitarnya.

Berdasarkan tataran pemikiran dan realitas demikian, maka pola pembangunan perumahan yang menjadikan masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan melalui pendekatan *supply and demand* dan *top down*, tidak akan menggerakkan dan memberdayakan potensi-potensi laten masyarakat marjinal tersebut.

Maka dibutuhkan suatu pendekatan keswadayaan dan tindak partisipatif untuk bisa mengembangkan kemandirian (*self-reliance*) berdasarkan potensi-potensi yang ada pada mereka. Program-program pembangunan mikro setempat yang bertumpu pada masyarakat selayaknya perlu dan terus dikembangkan, antara lain untuk mengimbangi dampak pembangunan makro.

Masalahnya adalah masyarakat ini susah disentuh secara struktural, karena pada dasarnya masyarakat ini memiliki jarak terhadap aturan yang mapan. Kemiskinan yang terjadi disebut sebagai kemiskinan struktural, karena sukar disentuh secara struktural. Sebagian besar dari masyarakat ini bahkan hampir tidak mengenal bank dan rekening bank. Bagi masyarakat pemilik modal tindakan menolong masyarakat marjinal bisa dikatakan sebagai *mission sacre*, yaitu "tugas suci" atau panggilan untuk menolong sesama manusia, mengingat bahwa dalam pandangan kapitalistik yang primitif tidak ada pelayanan publik. Semua dipandang dalam modus ekonomi sebagai sesuatu yang menghasilkan keuntungan dalam angka riil, kecuali dalam rangka tugas suci.

Dan masalah lain yang dialami dalam muncul dalam proses pembangunan adalah tindak pendekatan terhadap masyarakat ini. Seringkali para perencana menemui kesulitan dalam menemukan cara pemecahan masalah yang tepat sehingga beberapa proyek perumahan yang berusaha menciptakan hunian yang tepat bagi masyarakat ini mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh jarak yang sangat besar antara perencana terhadap masyarakat bawah dalam hal karakteristik proses pembangunan yang sangat berbeda antara keduanya.

Oleh sebab itu dalam rangka mengembangkan tindak partisipatif, program-program pembangunan mikro setempat yang bertumpu pada masyarakat selayaknya perlu dan terus dikembangkan, antara lain untuk mengimbangi dampak pembangunan makro. Dalam hal ini, pikiran dan tindakan alternatif dilakukan oleh sejumlah organisasi informal yaitu LSM/LPSM dalam pembangunan perumahan dan pemukiman untuk

menjembatani antara perencana dan masyarakat.

Kelemahan dari partisipasi yang hanya diarahkan pada penerapan kebijaksanaan (pola *top-down*), adalah bahwa ia tidak bisa menumbuhkan "rasa ikut memiliki" di kalangan masyarakat terhadap program pembangunan itu. Tanpa adanya rasa ikut memiliki, anggota masyarakat tidak akan merasa tergugah untuk ikut serta dalam pembangunan itu. Kalau secara formal mereka "mendukung" program pembangunan karena adanya instruksi pemerintah, maka yang terjadi bukanlah partisipasi dengan dorongan sifat keaktifan pribadi, tetapi mobilisasi dengan sifat keterpaksaan atau dorongan dari luar dirinya.

Dari pengalaman pembangunan hingga kini, perkembangan perumahan secara nasional masih menghadapi berbagai paradoks. Di satu sisi, perumahan secara fisik berkembang baik, bahkan beberapa arsitek Indonesia mendapat penghargaan internasional di bidang perumahan, di antaranya adalah YB. Mangunwijaya yang memperoleh penghargaan *Aga Khan Award for Architecture (AKAA)* dengan proyek Permukiman Kali Code di Yogyakarta. Dan untuk kalangan masyarakat mampu, pemenuhan kebutuhan pemukiman mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan tingginya angka pembangunan perumahan mewah seperti *real estate*, apartemen, dan kondominium, terutama di kota Jakarta.

2. Perancangan Partisipatif Menuju Nilai Baru

Pendekatan perancangan partisipatif memberikan kemungkinan terciptanya suatu pemahaman yang sama antara arsitek dan masyarakat calon penghuni tentang rumah (*home*), sesuai dengan konsep yang dipegang oleh masyarakat akan *dunia-hidup-nya (Lebenswelt)*. Pemahaman akan estetika yang terkandung pada konsep ini pun bukanlah suatu hal yang ada dalam genggam tangan arsitek dan menjadi teritori pribadinya, melainkan sesuatu yang terbuka untuk dikembangkan lagi oleh penghuninya. Dalam

hal ini arsitek menciptakan sistem yang memungkinkan estetika tersebut hadir dalam keterbatasan anggaran, bahan, teknik, dan informasi.

Metoda perencanaan dan perancangan lingkungan binaan untuk bermukim secara partisipatif memiliki peluang untuk menjamin terbentuknya suatu komunitas sosial, yang memungkinkan adanya terjadinya proses belajar dari calon penghuni untuk beradaptasi dan berintegrasi dengan lingkungannya. Masyarakat yang akan tinggal di dalam wilayah dunia-hidup baru yang direncanakan dibina sejak awal oleh arsitek untuk turut serta, urun rembuk dalam perancangan fisik tempat tinggal mereka. Posisi metode partisipatif pada kampung-kota bukan sekedar kebutuhan untuk menciptakan 'rasa saling memiliki', tetapi secara eksistensial mampu membangun pengertian bahwa mereka hidup dalam satu dunia-hidup yang menjadi rumah mereka selama mungkin.

Pendekatan manusiawi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perancangan dan perencanaan bangunan, setidaknya dapat mengatasi sejumlah kendala yang bisa mengakibatkan kegagalan suatu perumahan. Dengan pendekatan ini produk arsitektur yang merupakan hasil rancangan partisipatif dapat memberikan nilai baru yang menaikkan harkat dan martabat (*dignity*) masyarakat sebagai suatu yang bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan sumbangan yang berharga bagi peta budaya kita.

Jika memang pemerintah mengalami kesulitan dalam menggali sumber-sumber pembiayaan, serta kesulitan dalam menyediakan lahan perumahan/permukiman khususnya bagi masyarakat bawah, perlu dibuat pengertian baru mengenai makna 'partisipasi masyarakat' untuk mengatasi persoalan tersebut, sekaligus menjadikan pembangunan sebagai proses berkelanjutan dan meluas karena dinamika intern yang terjadi di dalam masyarakat (sinergis).

Upaya pendekatan ini dapat dianggap berhasil berdasarkan indikator-indikator antara lain secara fisik terbentuk suatu kawasan baru yang lebih teratur dan nyaman, secara sosial-psikologis pendekatan pembangunan bertumpu pada masyarakat itu, dapat mengembalikan

kepercayaan dan harga diri, membangkitkan suatu "energi sosial", dan selanjutnya menumbuhkan semangat baru untuk berusaha lebih maju menggapai peningkatan sosial-ekonominya.

3. Peran Arsitek

Maka jelas bahwa peranan arsitek tidak hanya terletak pada masalah perancangan, melainkan juga bagaimana arsitek memposisikan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna sebagai subyek dalam perancangan tersebut, dengan melibatkan masyarakat. Arsitektur untuk rakyat, tidak terbatas pada perancangan fisik saja, melainkan juga perancangan sosial yang berorientasi pada proses, yang menempatkan masyarakat sebagai subyek dengan melibatkannya dalam proses perancangan.

Jika mengacu kepada pemikiran politik dan arsitektur, dengan kata lain proses ini merupakan kombinasi antara *self-conscious tradition* yang menekankan pada otoritas arsitek dan *unself-conscious tradition* yang menekankan pada otoritas rakyat.

Peran arsitek dalam perancangan partisipatif tidak lagi sebagai pendeta yang secara kosmologis, punya wewenang untuk mengubah kosmos dengan memandang arsitektur sebagai model surgawi, tidak sebagai seorang master builders yang individualistis terhadap kreatifitas rancangannya semata, melainkan lebih sebagai seorang fasilitator dengan gagasan-gagasan yang lebih demokratis.

Not just build for the people, but also build with the people!

DAFTAR PUSTAKA

- Bloomer. Kent C & Charles W. Moore, *Body Memory, and Architecture*, Yale Universin- Press, New Haven & London, 1977.
- Budihardjo. Eko, *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan, Perkotaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Budihardjo, Eko, *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.

Fathy, Hassan, *Architecture for The Poor*, University of Chicago Press, 1973.

Hartono. Harastoeti Diby, *Kajian tentang Penghunian Runzah Susun ditinjau dari,Aspek Perilaku*, Tesis S-2 Jurusan Teknik Arsitektur ITB, Bandung, 1986.

Iskandar, MS. Barliana & Aslim Harmaini, *Pembangunan Perumahan: Antara .Marjinalisasi dan Partisipasi*, Majalah Konstruksi, Januari, 1995.

Jencks, Charles, *Modern Movement in Architecture*, Penguin Books. London, 1973.

Kuntjoro-Jakti; Dorodjatun, *Kemiskinan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1986.

Rapoport. Amos, *The Meaning of the Build Environment: A Non-verbal Communication Approach*, Sage Publications, London, 1982.

Seelig Michael Y., *The Architecture of Self-help Communities*, Architectural Record Books New York. 1978.

Wiryomartono. A. Baaes P. *.Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta, 1995.*